

Jumat, 26 Januari 2024

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Utak Atik Jalankan Beleid Modal Minimal
Nama Media	Kontan
Newstrend	AAJI Tanggapi Dampak POJK 23/2023
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	26/01/2024
Sentimen	positive

Utak Atik Jalankan Beleid Modal Minimal

Pengelompokan asuransi berdasar modal bikin dag dig dug

Arif Ferdianto

JAKARTA. Para pelaku industri asuransi terus melakukan diskusi soal penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 23 Tahun 2023. Beleid ini antara lain mengatur soal modal minimum asuransi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tambolon bilang, saat ini pihaknya masih mendiskusikan ulang detail aturan tersebut. Ini terutama soal pengelompokan asuransi di Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA) dan Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE).

Salah satunya, soal ketentuan asuransi yang belum memenuhi modal minimum boleh terus beroperasi asal bukan usaha yang kompleks. "Yang tidak kompleks ini definisinya apa? Ini yang dibahas lebih lanjut," kata Budi saat

ditemui, Kamis (25/1).

Dia menambahkan, saat ini jumlah anggota AAJI hampir mencapai 60 perusahaan. Dari jumlah tersebut, perusahaan asuransi yang masih memiliki ekuitas di bawah Rp 250 miliar, tidak sampai 10. Tapi, masalahnya, bagi perusahaan

Dilema Implementasi aturan kelompok asuransi berdasar modal.

yang belum memenuhi ekuitas, harus memikirkan solusi penambahan modal.

Premi anjlok

Penambahan modal bukan pilihan populer bagi investor atau pemilik perusahaan. Terlebih, pada 2023, pendapatan premi perusahaan asuransi

banyak yang anjlok, terutama akibat pengaturan unitlink.

Dus, jika perusahaan minta tambah modal kepada pemegang saham, pemegang saham akan berpikir dua atau tiga kali. "Ini yang mungkin akan kami bicarakan dengan regulator," imbuh Budi.

Senada, Ketua Umum Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan bilang, ada beberapa perusahaan yang tak bisa masuk dalam klusterisasi KPPE pada 2028, ketika kenaikan ekuitas minimum semakin tinggi. "Kami masih merumuskan bagaimana mengimplementasikan KPPE 1 dan KPPE 2," terangnya.

Saat ini, ada 12 perusahaan asuransi umum yang memiliki ekuitas di bawah Rp 250 miliar. Budi berharap, perusahaan tersebut bisa lolos dari ketentuan modal minimum. "Kami terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak ketiga untuk jadi *holding* dari anggota kami yang bisa terdilisasi aturan modal," katanya. ■

Kinerja Industri Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum Konvensional (Rp triliun)

Keterangan	Ekuitas		Liabilitas		Pendapatan Premi		Jumlah Investasi		Aset	
	Okt 22	Okt 23	Okt 22	Okt 23	Okt 22	Okt 23	Okt 22	Okt 23	Okt 22	Okt 23
Asuransi Umum	70,62	87,78	124,66	134,58	74,02	90,97	90,30	113,02	195,99	223,46
Asuransi Jiwa	92,61	120,42	503,19	450,19	139,56	129,82	520,57	502,10	596,31	571,57

Sumber: OJK

Judul	Tantangan 3 Penjuru Asuransi Jiwa
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	AAJI Ungkap Tantangan Industri Asuransi Jiwa dari Segi Regulasi
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	26/01/2024
Sentimen	positive

| OUTLOOK 2024 |

TANTANGAN 3 PENJURU ASURANSI JIWA

Bisnis, JAKARTA — Industri asuransi jiwa menghadapi tantangan setidaknya dari tiga sisi tahun ini, yakni penerapan Financial Reporting Standards (FRS) 117, pemenuhan kenaikan modal minimum, dan pemisahan unit syariah.

Rika Anggraini
rika.anggraini@bisnis.com

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tambuhon mengatakn penerapan FRS 117 berisiko menimbulkan dua dampak keuangan.

Pertama, biaya tambahan karena perusahaan harus membeli sistem. Kedua, menggerus ekuitas perusahaan. Seperti diketahui, dengan FRS 117, perusahaan asuransi hanya mengakui margin layanan kontraktual pada standar keuangan, bukan pendapatan premi dan biaya klaim yang digunakan

untuk memastikan keuntungan perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi harus mengadopsi IFRS 17 atau FRS 117 paling lambat mulai 1 Januari 2025, lebih lambat dari penerapan secara internasional yang dimulai 1 Januari 2023.

Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) itu, Budi menuturkan ada kemungkinan hasil yang berbeda pada laporan keuangan perusahaan, seperti laba yang mengecil. Bahkan, profit bisa berbalik menjadi negatif dan menggerus ekuitas. "Kalau ekuitasnya tergerus

sampai ke bawah minimal, atau masih di atas minimal, tapi RBC [tingkat solvabilitas] menjadi di bawah minimal, maka akan ada kebutuhan untuk menambahkan modal lagi," ungkapnya.

Padahal, pada saat yang sama, perusahaan asuransi harus menaikkan modal untuk memenuhi ekuitas minimum yang dinaikkan, mengikuti peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan, yakni POJK No. 23/2023 yang mengubah POJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Menurut beleid baru, perusahaan asuransi konvensional harus memenuhi modal minimal Rp250 miliar paling lambat 31 Desember 2026 dari semula Rp100 miliar. Perusahaan asuransi konvensional harus menaikkan lagi ekuitasnya menjadi minimal Rp500 miliar paling lambat 31 Desember 2028.

Sementara, perusahaan asuransi syariah harus memenuhi ekuitas minimal Rp100 miliar minimal selambat-lambatnya pada 31 Desember 2026 dan Rp200 miliar selambat-lambatnya pada 31 Desember 2028. OJK semula menetapkan ekuitas minimal asuransi syariah Rp50 miliar.

Pada akhir 2028, perusahaan-perusahaan asuransi akan dikelompokkan berdasarkan ekuitasnya menjadi Kelompok Perusahaan

Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan 2 serta Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA).

Budi mengatakan pemenuhan ekuitas minimum Rp250 miliar menjadi tantangan bagi industri asuransi jiwa. Menurutnya, masih ada 10 perusahaan asuransi jiwa anggota AAJI yang belum memenuhi modal Rp250 miliar. Namun, dia optimistis mereka bisa memenuhi ketentuan itu dalam dua tahun ke depan.

"Tinggal pertanyaannya adalah pemegang sahamnya bagaimana, karena pemegang saham akan melihat apakah ini saat yang tepat [untuk menyuntikkan modal] mengingat mereka juga punya beberapa usaha," ujarnya.

Budi menambahkan, AAJI juga akan melakukan diskusi ulang dengan OJK, salah satunya tentang kriteria produk asuransi yang kompleks dan kurang kompleks. Seperti diketahui, KPPE 2—dengan ekuitas lebih tinggi—akan diperbolehkan memasarkan produk asuransi yang lebih kompleks dibandingkan dengan KPPE 1 dan KUPA.

"Yang tidak kompleks ini definisinya apa?" ujar Budi.

Industri juga menghadapi tantangan dari kewajiban *spin off* unit syariah paling lambat 2026. Kewajiban itu juga disertai dengan keharusan menambahkan modal di anak perusahaan syariah yang nantinya dibentuk.

"Premi sedang turun, tapi dimin-

ta untuk menambahkan modal. Tapi secara keseluruhan, AAJI menyambut positif karena untuk perbaikan industri, tapi yang jadi pertanyaan adalah waktunya," tutur Budi.

AAJI mencatat total pendapatan premi asuransi jiwa pada kuartal III/2023 turun 7,7% *year-on-year* menjadi Rp132,04 triliun.

KLAIM MENGGUNUNG

Pada saat yang sama, akibat inflasi medis, AAJI memperkirakan klaim kesehatan asuransi jiwa akan menembus Rp20 triliun sepanjang 2023. Hal ini terlihat dari angka klaim yang sudah mencapai Rp15,2 triliun sepanjang Januari—September 2023.

Budi mengestimasi tambahan klaim sekitar Rp5 triliun pada tiga bulan terakhir 2023, berdasarkan estimasi rata-rata klaim kesehatan setiap kuartal tahun sebelumnya. Seperti diketahui, KPPE 2—dengan ekuitas lebih tinggi—akan diperbolehkan memasarkan produk asuransi yang lebih kompleks dibandingkan dengan KPPE 1 dan KUPA.

"Di satu sisi, kami senang karena kesadaran masyarakat untuk memiliki proteksi kesehatan meningkat, tapi sisi lain, kami juga harus mencermati klaim kesehatan yang meningkat," ungkapnya.

Menurut Budi, inflasi medis terjadi di sejumlah negara. Ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu panjang, biaya kesehatan cenderung akan semakin mahal. Dia berharap kondisi ini menjadi perhatian serius OJK dan Kementerian Kesehatan. ■

Industri asuransi jiwa menghadapi sejumlah tantangan yang sebagian berasal dari perubahan regulasi.

Dinamika Industri Asuransi

Perubahan Regulasi Sumber: AAJI
 Permodalan IFRS 17/PSAK 74 Spin off unit syariah
 (mulai 2026) (mulai 1 Januari 2025) (hingga 31 Desember 2026)

Dukungan Reasuransi
 Memperkuat reasuransi lokal dalam rangka mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa

Penguji Perjanjian Polis dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
 Kolaborasi PUJK, asosiasi, dan regulator dalam membentuk Lembaga Penjaminan Polis (LPP) (maksimal 5 tahun sejak UU PPSK diundangkan)

Peningkatan Klaim Asuransi
 Kolaborasi antari lembaga untuk menjaga stabilitas industri asuransi jiwa melalui kontrol biaya perawatan kesehatan



Judul	Klaim Meninggal ke Asuransi Turun per September 2023
Nama Media	medcom.id
Newstrend	AAJI Ungkap Penurunan Klaim Asuransi Meninggal
Halaman/URL	https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ZkealZzk-klaim-meninggal-ke-asuransi-turun-per-september-2023
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive



Klaim Meninggal ke Asuransi Turun per September 2023

Theofilus Han Suoplo • 25 Januari 2024 21:20

A+ A-

Jakarta: Asosiasi [Asuransi Jiwa Indonesia \(AAJI\)](#) mengabarkan klaim [meninggal](#) ke asuransi turun pada 2023. Angka itu terhimpun periode Januari-September 2023.

"Secara overall klaim meninggal dunia cenderung turun," kata Ketua Dewan Pengurus [AAJI](#) Budi Tampubolon dalam [media gathering](#) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2024.

Judul	Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa 2023 Bisa Tembus Rp20 Triliun Imbas Inflasi Medis
Nama Media	bisnis.com
Newstrend	AAJI Ungkap Tren Peningkatan Klaim Asuransi Kesehatan
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20240125/215/1735620/klaim-kesehatan-asuransi-jiwa-2023-bisa-tembus-rp20-triliun-imbasi-inflasi-medis
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa 2023 Bisa Tembus Rp20 Triliun Imbas Inflasi Medis

Angka klaim kesehatan asuransi jiwa diperkirakan mencapai Rp20 triliun pada tahun ini imbas inflasi medis atau kanakan blaya kesehatan

Rika Anggraeni - Bisnis.com
Kamis, 25 Januari 2024 | 21:53

Share [f](#) [t](#) [w](#) [in](#) [v](#) [p](#)



Karyawan beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta. / Bisnis/Arif Hermawan P.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memperkirakan klaim kesehatan asuransi jiwa akan menembus di angka Rp20 triliun sepanjang 2023. Hal ini terlihat dari angka klaim yang sudah mencapai Rp15,2 triliun sepanjang Januari–September 2023.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon mengestimasi adanya peningkatan sekitar Rp5 triliun di tiga bulan terakhir 2023, dengan memperkirakan bahwa di setiap kuartal tahun lalu klaim kesehatan mencapai Rp5 triliun.

Judul	Asuransi dan Reaktor Nuklir
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Artikel Literasi Asuransi
Halaman/URL	Pg50
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive

M-SPOTLIGHT

Asuransi dan Reaktor Nuklir



Mucharor Djail

Apa yang muncul dalam pikiran kita ketika mendengar kata asuransi? Apakah orang yang menawarkan untuk beli asuransi, baik secara langsung datang ke rumah atau tempat kerja kita? Atau terbayang orang yang menawarkan untuk beli asuransi melalui saluran digital, seperti email, facebook, instagram, X (twitter), atau bahkan melalui tiktok? Atau, terbayang demonstrasi berjilid-jilid yang berkaitan dengan produk asuransi unitlink?

Padahal, asuransi secara singkat adalah salah satu pengelolaan risiko yang ada dalam hidup kita ini. Baik yang berkaitan dengan harta benda kita maupun jiwa kita. Yang menarik, risiko yang diperkirakan akan menimpa kita dapat dialihkan atau ditransfer kepada perusahaan asuransi, baik itu perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum.

sebagainya.

Fred Iswara, salah satu tokoh pendiri Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo), pernah dalam salah satu sesi untuk *management trainee* di perusahaan pialang asuransi, mengatakan bahwa kalau bekerja di industri asuransi harus belajar terus. "Karena asuransi terus berkembang," pesannya kepada para *management trainee* di Jakarta.

Fred Iswara adalah mantan dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung. Selesai kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, ia melanjutkan kuliah di State University of New York, Buffalo, New York, Amerika Serikat. Dalam karier akademisnya, ia pernah menjadi asisten Profesor Mochtar Kusumaatmadja, yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Kehakiman RI, di bawah kepresidenan Jenderal Soeharto.

Setelah meninggalkan dunia akademis, Fred Iswara mendirikan perusahaan pialang asuransi PT Mitra, Iswara & Rorimpandey. Perusahaan pialang asuransi yang didirikan di bulan Januari 49 tahun lalu, termasuk salah satu dari 15 *market leaders* di industri pialang asuransi Indonesia, sebagaimana hasil kajian Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) berdasar data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di negara-negara lain, terutama negara industri maju, asuransi sudah merupakan kebutuhan. Seorang eksekutif asing (*expatriate*) yang bekerja di suatu perusahaan asuransi di Jakarta mengungkapkan kalimat yang menarik mengenai asuransi: "No every country has a nuclear plant. But no country without insurance".

Jadi, menurut eksekutif asing tersebut suatu negara di dunia ini boleh saja belum mempunyai suatu reaktor nuklir, tapi dapat dipastikan punya industri asuransi. Artinya memang asuransi merupakan suatu kebutuhan, dari masalah risiko kesehatan, keberlanjutan pendidikan anak-anak, perlindungan pabrik, sampai satelit yang sedang mengorbit dan seterusnya.

Mengapa asuransi di Indonesia masih belum dipahami juga sebagai suatu kebutuhan?

Menurut Fred Iswara, kegiatan asuransi mengikuti kegiatan ekonomi. Di mana ada kegiatan ekonomi, di situlah ada asuransi.

Untungnya, setelah adanya demonstrasi berjilid-jilid mengenai produk unitlink, sekarang semakin banyak orang yang sadar dan memahami asuransi. Untungnya pula, ada banyak produk asuransi untuk pengelolaan risiko, baik itu untuk harta benda maupun jiwa kita. ■

50 MEDIA ASURANSI □ Januari 2024 □ No. 396 □ Tahun XLIII

Judul	3 Tahun Terakhir Tembus 214 Persen
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Catatan Kinerja Sequis
Halaman/URL	Pg24
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive



COVER STORY



Edisjah
**3 Tahun Terakhir
Tumbuh 214 Persen**

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) mencatatkan perkembangan bisnis asuransi jiwa kredit (AJK) yang bagus dalam tiga tahun terakhir. "Bisnis AJK di Sequis Financial memiliki *growth* sebesar 214 persen dari semester 1/2020 hingga semester 1/2023. *Growth* ini didukung dengan penambahan mitra bank baru dan produk AJK yang variatif seperti KPR, KMG, KPH, PL, dan produk AJK lainnya," kata *President Director* Sequis Financial, Edisjah, kepada *Media Asuransi*.

Dikutip dari laman resmi Sequis Financial, pendapatan premi perseroan per November 2023 tercatat sebesar Rp85,17 miliar, naik 58,88 persen *year on year* (yoy) dibandingkan per November 2022 yang tercatat sebesar Rp53,61 miliar. Jumlah ekuitas Sequis Financial per November 2023 tercatat sebesar Rp163,74 miliar, sedangkan nilai asetnya tercatat sebesar Rp509,72 miliar per November 2023.

Di bisnis AJK, perkembangan yang terbaru adalah pada pertengahan Desember 2023, Sequis Financial dan Bank ICBC Indonesia menjalin kerja sama *barcassurance* produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Multiguna (KMG) untuk nasabah Bank ICBC Indonesia. Produk (AJK) KPR/KMG ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah Bank ICBC Indonesia yang akan mengambil produk KPR.

Nasabah dapat memiliki rumah tinggal dengan pinjaman yang dilindungi oleh Sequis Financial. Selama periode KPR berlangsung, nasabah akan mendapatkan perlindungan untuk kejadian-kejadian yang ditanggung sesuai polis dan keluarga debitur akan dibebaskan dari kewajiban kredit. Sequis Financial yang akan melunasi sisa pinjaman.

Sementara itu, Sequis financial menyambut POJK yang mengatur tentang asuransi kredit yang dikeluarkan pada Desember 2023. "Sequis Financial menyambut positif POJK baru mengenai asuransi kredit, debitur wajib memiliki perlindungan risiko meninggal dunia dari asuransi jiwa," kata Edisjah.

Menurut dia, hingga saat ini Sequis Financial tetap memberikan layanan terbaik bagi setiap nasabah AJK. Layanan itu antara lain meliputi proses pengajuan asuransi dan proses klaim yang mudah bila terjadi risiko terhadap nasabah.

Sebagai upaya mitigasi risiko bisnis asuransi jiwa kredit, menurut Edisjah, saat ini Sequis Financial bekerja sama dengan perusahaan reasuransi. "Sequis Financial juga menerapkan standar pengajuan asuransi yang optimal serta penyesuaian tingkat Uang Pertanggungan (UP) untuk fleksibilitas nasabah," tuturnya. ■

S. Edi Santosa

Judul	Fokus Perbaikan Portofolio AJK
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Catatan Kinerja Taspen
Halaman/URL	Pg27
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive



Ibnu Hasyim
Fokus Perbaikan Portofolio AJK

Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life), Ibnu Hasyim, mengatakan bahwa POJK Nomor 20 Tahun 2023 sudah mengakomodasi sebagian kebutuhan asuransi. Yakni dengan adanya aturan yang

terkait pembatasan seleksi risiko.

"Namun aturan tersebut masih belum mencakup pada akses profil risiko atau historikal debitur terkait dengan agregasi pinjaman di bank-bank lain, di luar dari bank yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Saat ini pihak bank masih dapat melakukan *split* pertanggunggaan ke beberapa perusahaan asuransi," ujar Ibnu kepada *Media Asuransi*.

Khusus terkait aturan dalam POJK yang mengatur bahwa risiko jiwa dalam asuransi kredit hanya boleh di-cover oleh asuransi jiwa, menurut Ibnu pengaturan pemisahan ruang lingkup cover risiko tersebut sejalan dengan Undang-Undang tentang Perasuransian. Dia berharap pengaturan tersebut dapat menciptakan kompetisi yang sehat pada bisnis Asuransi Jiwa Kredit (AJK).

"Diharapkan POJK tersebut memberikan pertumbuhan ke arah yang lebih baik untuk industri asuransi jiwa, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Sejauh ini mitigasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan dalam bisnis produk AJK adalah melalui pembuatan pedoman atau kebijakan seleksi risiko yang diterapkan untuk penutupan bisnis AJK. Yakni dengan mempertimbangkan risiko yang ditanggung serta manfaat asuransi yang dijanjikan oleh Perusahaan. Selain itu melakukan penerapan besaran premi yang didasarkan pada asumsi wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum untuk perusahaan asuransi jiwa.

"Taspen Life juga melakukan kajian secara komprehensif terhadap *experience study* sebagai dasar untuk pembentukan tarif premi dan pencadangan," jelas Ibnu.

Kemudian dari sisi *backup* reasuransi, dia menuturkan bahwa sampai saat ini masih banyak reasuransi yang belum membuka kerja sama untuk meng-cover AJK. Diharapkan dengan POJK baru ini reasuransi kembali memberikan dukungannya, sehingga bisnis asuransi dan reasuransi dapat berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dalam tiga tahun terakhir, Taspen Life tengah fokus untuk melakukan perbaikan portofolio produk AJK sehingga sangat selektif dalam melakukan pemasaran produk AJK. Hal tersebut berangkat dari berbagai alasan, di antaranya adalah, rasio klaim yang tinggi dari portofolio eksisting karena seleksi risiko yang tidak berjalan dengan baik pada saat pendaftaran asuransi. ■

Muh Fajral Falah

Judul	Berharap POJK 20/2023 Dapat Diterapkan Semua Pihak
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Dampak POJK 20/2023
Halaman/URL	Pg21
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive

COVER STORY

BUDI TAMPUBOLON

Berharap POJK 20/2023 Dapat Diterapkan Semua Pihak

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Budi Tampubolon, menyampaikan bahwa asuransi kredit merupakan salah satu produk yang diharapkan oleh industri untuk dapat diatur lebih dalam oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK). Pengaturan itu dari sisi pembentukan produknya sampai dengan proses pemasaran dan penutupan asuransinya.

Bagaimana pandangan dan tanggapan Ketua Dewan Pengurus AAJI ini terhadap POJK 20 tahun 2023, berikut petikan hasil wawancaranya:

Bagaimana asosiasi menanggapi keluarnya POJK tentang asuransi kredit dan apa harapan ke depan?

Menanggapi POJK tentang asuransi kredit yang baru ini, AAJI sudah melakukan kajian secara lebih dalam terkait produk asuransi jiwa kredit (AJK) dengan mengundang konsultan independen untuk membuat kajian serta analisa terkait AJK. Hasil kajian tersebut telah kami presentasikan kepada OJK sebagai bahan pertimbangan langkah strategis OJK untuk mengambil kebijakan.

Langkah OJK menerbitkan aturan baru terkait AJK ini kiranya dapat menjadi jawaban dari harapan industri asuransi jiwa kepada regulator. OJK juga secara aktif melibatkan asosiasi dalam masa penyusunan POJK tersebut.

POJK tersebut diharapkan dapat diterapkan dan diikuti berbagai pihak terkait produk AJK termasuk stakeholder penting, dengan harapan agar peristiwa sebelumnya tidak terulang, terdapat perbaikan, dan dapat melindungi kepentingan tertanggung asuransi jiwa maupun keberlangsungan usaha perusahaan asuransi jiwa yang sehat melalui penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dan tata kelola serta kepatuhan yang semakin baik.



Dalam POJK disebutkan ada pembagian risiko 75 persen (asuransi) dan 25 persen (bank) jika terjadi gagal bayar oleh debitur. Apakah pembagian tersebut sudah win-win solution bagi kedua belah pihak?

Pada dasarnya AAJI mendukung sebagai langkah mitigasi risiko yang lebih besar di industri asuransi jiwa. Salah satunya risiko anti seleksi yang diterapkan beberapa perusahaan asuransi jiwa. Hal ini juga agar pihak bank meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan seleksi nasabah.

Selain itu jenis pembagian risiko ini akan lebih fleksibel diterapkan sehingga besarnya dapat diatur sesuai dengan kesepakatan industri dengan pihak mitra bisnis kreditur.

POJK baru mengatur batas maksimal kredit hanya 5 tahun, bagaimana menurut tanggapan Anda?

Kami percaya bahwa hal tersebut

telah dipertimbangkan dengan baik oleh OJK, setelah mendengar masukan dari beberapa pihak. Secara prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko, hal tersebut lebih baik bagi para pihak. Namun demikian, pelaksanaannya nanti di lapangan ketika masa pertanggungan 5 tahun menjelang selesai perlu dipersiapkan dengan seksama oleh pihak kreditur maupun penanggung.

Usulan apa saja yang disampaikan AAJI berkaitan dengan POJK baru dan sejauhmana OJK mengakomodirnya?

Pertanggungan AJK sarat dengan unsur risiko mortalitas. Sehingga kehati-hatian dalam pengelolaan risiko (proses *underwriting*, *pricing*, *pencaadangan*, *reasuransi*, dan lain-lain) tidak boleh dikorbankan demi kepentingan bisnis sesaat.


Seyogyanya *mortality risk* sepenuhnya dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten, dan dikelola oleh perusahaan yang memiliki *izin*, *experience*, dan *expertise* untuk itu.

Reasuradur dapat memberikan persyaratan yang sama kepada perusahaan asuransi jiwa untuk setiap jenis pinjaman yang sama agar tidak ada diskriminasi antara satu perusahaan asuransi jiwa dan yang lainnya.

OJK memberikan dukungan penuh kepada AAJI untuk dapat mengatur ketentuan AJK di industri asuransi jiwa. Diharapkan peraturan tersebut terdapat ketentuan yang jelas dan dapat diterapkan oleh semua pihak. ■ **Wahyu Widhiastuti**

MEDIA ASURANSI □ Januari 2024 □ No. 396 □ Tahun XLIII 21

Judul	Berpotensi Timbulkan Masalah baru
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Dampak POJK 20/2023
Halaman/URL	Pg25
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive



**Fuad Hasan
Sampulawa**
**Berpotensi
Timbulkan
Masalah Baru**

Terbitnya POJK Nomor 20/2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah, ditanggapi beragam oleh pelaku perasuransian Tanah Air. Salah satunya adalah pihak pialang asuransi (broker) yang mewakili kepentingan dari nasabah alias kreditur.

Direktur Utama PT Bumi Insurance Brokers, Fuad Hasan Sampulawa, menilai pokok-pokok aturan baru yang termaktub dalam POJK tersebut berpotensi menciptakan masalah baru, yang membuat degradasi atas *trust* lembaga keuangan terhadap asuransi.

Sebagai pialang asuransi yang menangani produk asuransi kredit, Fuad memaparkan bahwa permasalahan dari asuransi kredit saat ini disebabkan beberapa hal. Pertama, masih ada perang tarif premi untuk mendapatkan bisnis dari lembaga keuangan.

Kedua, ada ketentuan *term & condition* yang memberikan kemudahan ketentuan pada saat proses akseptasi tetapi sebaliknya kemudahan tersebut bisa berbalik menjadi celah penolakan pada saat proses penyelesaian klaim.

Ketiga, sambung dia, ada regulasi yang membolehkan perusahaan asuransi untuk menghentikan pertanggungjanaan sementara risiko dari lembaga keuangan masih berjalan. Dan keempat, keterbatasan perusahaan asuransi dalam pengembangan investasi untuk menyelaraskan risiko klaim.

"Solusi atas hal ini yaitu juga membutuhkan peran aktif regulator dalam hal ini harmonisasi kebijakan antara regulator perbankan dan regulator non bank dalam menentukan dan pengawasan tarif premi, ketentuan *term & condition* asuransi jiwa kredit/asuransi kredit dan ketentuan lainnya pada saat perusahaan asuransi bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk meng-cover risiko kredit tersebut sehingga ada keselarasan dan pemahaman yang sama terkait risiko dari masing-masing pihak (lembaga keuangan dan perusahaan asuransi)," jelasnya kepada *Media Asuransi*.

Menurut Fuad, jika implementasi aturan tersebut bisa diterima oleh lembaga keuangan maka bisnis asuransi kredit bisa *rebound*, tetapi sebaliknya jika implementasi aturan tersebut tidak menarik bagi lembaga keuangan atau belum bisa diterima di pasar maka ada kemungkinan sebaliknya.

"Komitmen kerja sama yang baik di antara seluruh pelaku asuransi bersama regulator serta peningkatan literasi atas mitigasi risiko asuransi kredit dan asuransi jiwa kredit perlu dilakukan konsisten dan berkesinambungan," papar dia. ■ *Achmad Aris*

Judul	Industri Multifinance Siap Patuhi POJK 20/2023
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Dampak POJK 20/2023
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive

COVER STORY 

Industri Multifinance Siap Patuhi POJK 20/2023

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 20 tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah. Ada beberapa hal baru diatur dalam POJK tersebut, antara lain mengenai pembagian risiko (*risk sharing*) perusahaan asuransi umum dan asuransi umum syariah dengan pihak kreditor.

Direktur Utama PT Clipan Finance Indonesia Tbk, Harjanto Tjitohardjo, mengatakan bahwa POJK tentang asuransi kredit ini akan berdampak pada kinerja penyaluran kredit di industri *multifinance* ke depannya. "Jika kebijakan asuransi kredit memenuhi harapan perusahaan pembiayaan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyaluran kredit," jelasnya kepada *Media Asuransi*.

Harjanto menambahkan, Clipan Finance optimistis dapat melaksanakan isi POJK baru itu terutama tentang aturan mengenai *sharing* data debitur kepada perusahaan asuransi. Dia juga mengaku siap mengikuti regulasi baru lainnya, salah satunya tentang batas minimal kredit yang hanya lima tahun. "Dua kami hal itu bisa dilaksanakan," jelasnya.

Lebih lanjut, dia katakan bahwa saat ini ada tiga jenis asuransi terkait pembiayaan kendaraan yang Clipan Finance miliki. Pertama, asuransi umum. Jenis asuransi ini meliputi asuransi kendaraan yang dibiayai terkait kerusakan atau hilang unit. "Di Clipan Finance ini menjadi lini bisnis yang wajib ada. Semua pembiayaan di CFI diwajibkan," tegas Harjanto.

Kedua adalah asuransi jiwa/ACP. Asuransi jiwa pada Clipan Finance ditujukan untuk meng-cover *customer-customer* tertentu atau perorangan, jika *customer* meninggal maka kendaraan akan dilunasi oleh pihak asuransi. "Tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan pihak asuransi," katanya.

Ketiga, asuransi kredit. Dia menuturkan bahwa untuk jenis asuransi ini, perusahaan belum dapat menerapkan. Karena kebijakan asuransi kredit belum sesuai harapan perusahaan di industri pembiayaan. Namun perusahaan terus mengkaji terkait kebijakan tersebut. "Sejauh ini, di Clipan Finance hanya lini *general insurance* untuk kendaraan yang kreditanya di-cover oleh perusahaan asuransi," ungkap Harjanto.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, mengatakan bahwa dengan adanya regulasi baru tersebut, asosiasi menyambut secara positif. "Kami mendukung dan menyambut secara positif adanya regulasi yang baru untuk kebaikan bersama," jelasnya.

Secara terpisah, *Senior Research Associate* IFG Progress, Ibrahim Kholil Rohman, mengatakan bahwa dengan adanya POJK Asuransi Kredit yang mengatur *risk sharing* bisnis asuransi kredit dengan kreditor. Hal tersebut menjadi sinyal harapan bagi industri untuk dapat memperkuat bisnis asuransi kredit secara umum.

"Selain adanya *risk sharing* antara perbankan dan asuransi yang dapat memperkuat bisnis asuransi kredit, ketentuan mengenai subrogasi juga dinilai perlu diatur lebih mendalam," jelasnya kepada Achmad Aris dari *Media Asuransi*.

Ibrahim memberi contoh pengaturan khusus terkait *cut off* atau perihaltenggat waktu, subrogasi, serta perlunya kolaborasi lebih mendalam antara kreditor dan asuransi terkait pemberian informasi data kredit yang disalurkan dari kreditor sehingga perusahaan asuransi juga dapat melakukan *monitoring*.

Menurutnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara rata-rata premi asuransi kredit yang direasuransikan terbilang cukup rendah dibandingkan lini bisnis lainnya seperti *engineering, liability*, dan *personal accident*. Ketiga lini bisnis ini mencatatkan pendapatan premi lebih sedikit dibandingkan asuransi kredit dan *loss ratio* jauh lebih rendah dibandingkan asuransi kredit yang mencatatkan *loss ratio* cukup tinggi yakni lebih dari 70 persen.

"Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemain reasuransi lokal cenderung sangat selektif dalam menerima risiko dari industri asuransi kredit," ujarnya.

Namun, menurutnya, reasuransi turut berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan terutama di ekosistem industri asuransi kredit. Misalnya seperti pada periode setelah krisis GFC 2008, porsi premi asuransi kredit yang direasuransikan tercatat semakin meningkat. Pada saat bersamaan, surplus *underwriting* asuransi kredit juga menunjukkan peningkatan.

"Ini artinya, reasuransi dinilai cukup mampu menjaga kestabilan surplus *underwriting* di sektor asuransi kredit yang umumnya cukup rentan terdampak dari kondisi perekonomian dan aktivitas sektor perbankan," kata Ibrahim. ■

Muh Fajrul Falah

Judul

Masa Depan Asuransi Kredit Pasca Hadirnya POJK Nomor 20/2023

Nama Media

Media Asuransi

Newstrend

Dampak POJK 20/2023

Halaman/URL

Pg6&7&8

Tanggal Berita

25/01/2024

Sentimen

positive

Masa Depan Asuransi Kredit Pasca Hadirnya POJK Nomor 20/2023

Beberapa tahun terakhir, lini bisnis asuransi kredit menjadi penyumbang premi terbesar ketiga di asuransi umum setelah asuransi harta benda (properti) dan kendaraan bermotor. Namun, lini bisnis yang satu ini juga menjadi penyebab anjloknya kinerja perusahaan asuransi umum dan reasuransi. Kebijakan POJK Nomor 20/2023 tentang Asuransi Kredit, diharapkan akan memperbaiki kinerja lini bisnis ini di masa mendatang.

Langkah awal dilakukannya PT Asuransi Jasa Raya Tbk (Asuransi Jasa Raya) sejak tahun 2020. Sebelum pandemi Covid-19, Asuransi Jasa Raya meraih premi asuransi kredit Rp1,5 triliun, sejak 2020 hingga saat ini masih di tahun belasan, tidak pernah terpecah.

Keberhasilan ini tentu saja tidak terlepas dari peran aktif pemerintah, terutama dalam hal regulasi. Langkah awal dilakukannya PT Asuransi Jasa Raya Tbk (Asuransi Jasa Raya) sejak tahun 2020, sebelum pandemi Covid-19, Asuransi Jasa Raya meraih premi asuransi kredit Rp1,5 triliun, sejak 2020 hingga saat ini masih di tahun belasan, tidak pernah terpecah.

Keberhasilan ini tentu saja tidak terlepas dari peran aktif pemerintah, terutama dalam hal regulasi. Langkah awal dilakukannya PT Asuransi Jasa Raya Tbk (Asuransi Jasa Raya) sejak tahun 2020, sebelum pandemi Covid-19, Asuransi Jasa Raya meraih premi asuransi kredit Rp1,5 triliun, sejak 2020 hingga saat ini masih di tahun belasan, tidak pernah terpecah.

Keberhasilan ini tentu saja tidak terlepas dari peran aktif pemerintah, terutama dalam hal regulasi. Langkah awal dilakukannya PT Asuransi Jasa Raya Tbk (Asuransi Jasa Raya) sejak tahun 2020, sebelum pandemi Covid-19, Asuransi Jasa Raya meraih premi asuransi kredit Rp1,5 triliun, sejak 2020 hingga saat ini masih di tahun belasan, tidak pernah terpecah.

Pengaturan Asuransi Kredit dalam POJK 20/2023

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur atas risiko gagal bayar debitur. POJK 20/2023 mengatur ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme asuransi kredit.

Judul	Menguatkan Kerja Sama Yang Berkesinambungan
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Dampak POJK 20/2023
Halaman/URL	Pg10&11&12
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive

COVER STORY

POJK 20/2023 TENTANG ASURANSI KREDIT

Menguatkan Kerja Sama yang Berkesinambungan

Di penghujung tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan peraturan baru tentang asuransi kredit untuk menggantikan peraturan lama yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang POJK ini adalah bagian dari POJK yang mengatur tentang asuransi kredit. POJK ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

Perubahan lainnya dalam POJK ini adalah bagi asuransi yang menjadi asuransi kredit yang diatur dalam POJK. POJK ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

Perubahan lainnya dalam POJK ini adalah bagi asuransi yang menjadi asuransi kredit yang diatur dalam POJK. POJK ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

COVER STORY

Waktu berdirinya POJK ini akan membuat industri perasuransian akan semakin kuat dan lebih berkembang karena ini akan memperkuat asuransi yang ada di pasar asuransi yang sudah ada.

Perubahan lainnya dalam POJK ini adalah bagi asuransi yang menjadi asuransi kredit yang diatur dalam POJK. POJK ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

Perubahan lainnya dalam POJK ini adalah bagi asuransi yang menjadi asuransi kredit yang diatur dalam POJK. POJK ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

COVER STORY

POJK 20/2023 TENTANG ASURANSI KREDIT

Menguatkan Kerja Sama yang Berkesinambungan

Di penghujung tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan peraturan baru tentang asuransi kredit untuk menggantikan peraturan lama yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang POJK ini adalah bagian dari POJK yang mengatur tentang asuransi kredit. POJK ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

Perubahan lainnya dalam POJK ini adalah bagi asuransi yang menjadi asuransi kredit yang diatur dalam POJK. POJK ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

Perubahan lainnya dalam POJK ini adalah bagi asuransi yang menjadi asuransi kredit yang diatur dalam POJK. POJK ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

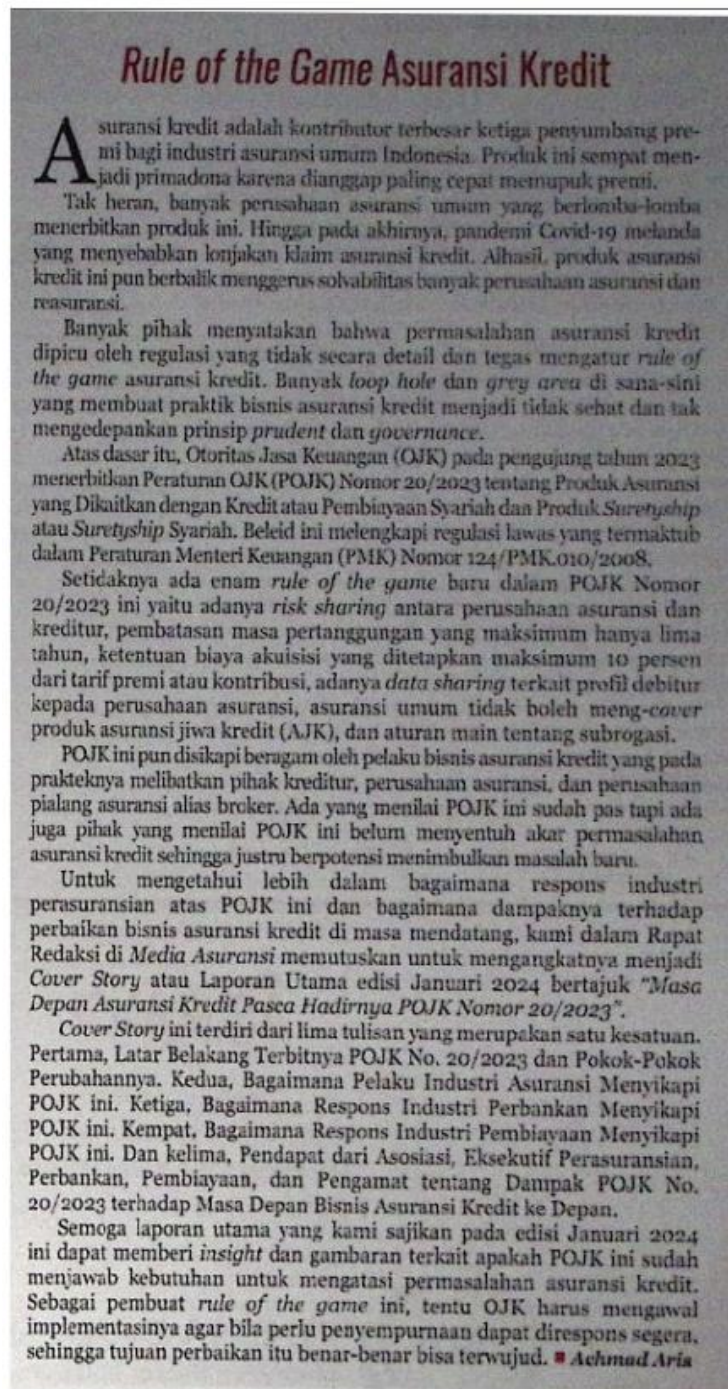
COVER STORY

Waktu berdirinya POJK ini akan membuat industri perasuransian akan semakin kuat dan lebih berkembang karena ini akan memperkuat asuransi yang ada di pasar asuransi yang sudah ada.

Perubahan lainnya dalam POJK ini adalah bagi asuransi yang menjadi asuransi kredit yang diatur dalam POJK. POJK ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

Perubahan lainnya dalam POJK ini adalah bagi asuransi yang menjadi asuransi kredit yang diatur dalam POJK. POJK ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kelengkapan pejabat di industri perasuransian menyambut positif hadirnya POJK yang sudah lama dinantikan tersebut. Perubahan apa saja yang masuk dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023?

Judul	Rule Of The Game Asuransi Kredit
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Dampak POJK 20/2023
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive



Judul	Kado Beleid Anyar Dari OJK
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	POJK 20/2023, 22/2023, dan 23/2023
Halaman/URL	Pg5
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive

EDITORIAL

Kado Beleid Anyar dari OJK

Di pengujung tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tiga kado spesial kepada industri perasuransian Tanah Air. Kado itu berupa tiga beleid anyar dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berpotensi mengubah lanskap bisnis perasuransian nasional. Ketiga beleid itu adalah POJK Nomor 20/2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah, POJK Nomor 22/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 23/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Pertama, POJK Nomor 20/2023 ini lebih akrab disebut sebagai POJK tentang Asuransi Kredit. POJK ini lahir untuk mengatasi permasalahan pelik terkait produk asuransi kredit yang sepanjang 2021-2022 sempat mengguncang fundamental sejumlah perusahaan asuransi dan reasuransi nasional. Oleh sebagian pihak, kehadiran POJK ini dianggap untuk mengisi kekosongan regulasi lawas yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124 tahun 2008. Beleid judul ini belum secara detail membahas mengenai tarif dasar, *risk sharing* antara kreditor dan perusahaan asuransi, hingga aturan mengenai akses data.

Setidaknya ada 6 pokok perubahan dalam POJK tersebut yaitu adanya *risk sharing* sebesar 25 persen untuk kreditor dan 75 persen untuk asuransi, pembatasan jangka waktu pertanggungjawaban maksimal 5 tahun, adanya batasan *acquisition cost* maksimum sebesar 10 persen, *data sharing* nasabah atau debitur kepada perusahaan asuransi, aturan main tentang subrogasi, dan asuransi umum tidak diperbolehkan meng-cover produk asuransi jiwa kredit (AJK).

Kedua, POJK Nomor 22/2023. POJK ini sebenarnya mengatur ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Namun, sektor asuransi mendapat perhatian khusus terkait dengan produk unilink alias Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Bukan rahasia umum lagi bahwa produk unilink ini sempat heboh dan berakibat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi. Pada 2022, OJK meresponsnya dengan menerbitkan SE OJK Nomor 5/SEOJK.05/2008 tentang PAYDI.

Kini, OJK kembali mempertegasnya dalam POJK Nomor 22/2023. Ada 7 kewajiban perusahaan asuransi dalam pemasaran PAYDI dan 3 kewajiban perusahaan asuransi dalam penyusunan perjanjian terkait PAYDI.

Ketiga, POJK Nomor 23/2023 yang *concern*-nya adalah terkait permodalan perusahaan asuransi dan reasuransi baik konvensional maupun syariah. Beberapa poin penting yang diatur adalah perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp1 triliun pada 31 Desember 2028, bila ingin beroperasi secara penuh. Namun, untuk tahap pertama yakni per 31 Desember 2026, ekuitas minimum yang mesti dipenuhi adalah Rp250 miliar.

Untuk perusahaan asuransi syariah, ekuitas minimum pada 31 Desember 2028 minimum Rp500 miliar, jika ingin beroperasi secara penuh. Adapun per 31 Desember 2026, ekuitas minimumnya ditetapkan sebesar Rp100 miliar.

Sementara itu untuk reasuransi, ekuitas minimumnya dua kali lipat dari ekuitas minimum asuransi. Perusahaan reasuransi minimum memiliki ekuitas sebesar Rp500 miliar per 31 Desember 2026, dan kemudian minimum Rp2 triliun pada 31 Desember 2028 jika ingin beroperasi secara penuh. Reasuransi syariah, minimum memiliki ekuitas Rp200 miliar per 31 Desember 2026 dan menjadi minimum Rp1 triliun pada 31 Desember 2028.

POJK ini memperkenalkan pengelompokan perusahaan asuransi berdasarkan ekuitas yaitu Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2. Selain itu, konsolidasi juga menjadi opsi bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum tersebut. Konsolidasinya bisa melalui penggabungan/peleburan, akuisisi, atau pembentukan Kelompok Usaha Perusahaan (KUPA).

Bukan kado yang membahagiakan pastinya, khususnya POJK Nomor 23/2023. Ketentuan-ketentuan yang sebelumnya berupa wacana dan diskursus tersebut, kini telah disahkan menjadi regulasi yang mengikat untuk seluruh pelaku perasuransian nasional. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, pelaku industri harus melaksanakannya. Kita percaya tujuannya adalah baik yaitu demi perbaikan industri yang sedang mengalami krisis kepercayaan masyarakat.

Namun demikian, OJK juga jangan menutup mata dalam proses implementasi beleid anyar ini. Bila dalam perjalanannya perlu revisi atau penyesuaian, jangan ragu dan segan untuk dilakukan. Pasalnya, pertaruhanannya adalah masa depan industri asuransi sendiri. ■ **Achmad Aris**

Judul	Digital Financial Excellence Award 2023 Media Asuransi
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Sejumlah Perusahaan Asuransi Jiwa Raih Digital Financial Excellence Award 2023
Halaman/URL	Pg46&47
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive

SPECIAL REPORT

MALAM PENGANUGERAHAN

Digital Financial Excellence Award 2023 Media Asuransi

Kemajuan teknologi digital membuat dunia berubah semakin cepat, dan perusahaan yang dapat menerima serta menggunakan teknologi secara efektif memiliki peluang yang signifikan untuk tumbuh dan berkembang dalam dunia bisnis.

Transformasi digital dianggap penting bagi bisnis agar tetap kompetitif dalam lanskap teknologi yang selalu berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan yang mulai mengadopsi teknologi baru untuk menyederhanakan operasi serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Tak dapat disangkal jika India memajukan Indonesia juga kini sangat melek teknologi dan tidak terkecuali. Hal ini terjadi seiring dengan kemajuan tingkat penetrasi internet di Indonesia yang menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencapai 78,16 persen pada tahun 2023. Artinya, sebanyak 121,61 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 253,77 juta, telah menggunakan teknologi internet.

Ditengah tantangan perkembangan global yang masih tidak merata pada pandemi Covid-19, Media Asuransi kini perlahan-lahan memberikan penghargaan Digital Financial Excellence Award 2023 kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan dan mengembangkan inovasi digitalnya. Acara pemberian penghargaan dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, 19 Desember 2023.

Untuk menghormati para peraih Digital Financial Excellence Award 2023, Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) bekerja sama dengan Adhika Group melakukan survei dan riset untuk mengetahui sejauh mana dampak transformasi dan inovasi digital terhadap kepuasan pelanggan di industri jasa keuangan yang berjalan selama 3 bulan.

Inspektur Utama PT Media Asuransi Indonesia, Muchtar Djali, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam ajang penghargaan ini dengan niat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, seperti bank, perusahaan asuransi, sekuritas, dan sebagainya, untuk lebih meningkatkan teknologi digitalnya, dari seluruh usahanya dengan lebih baik. Karena, bagaimanapun, teknologi digital tidak bisa dilepaskan dari kegiatan bisnis, termasuk dalam jasa keuangan.

"Untuk lebih obyektif dan lebih luas, dalam memutarakan pemberian Digital Financial Excellence Award 2023 yang diselenggarakan oleh Media Asuransi, kami bekerja sama dengan Adhika Group. Testanya, bagaimana selaku masyarakat peraih ini, apa saja yang dilakukan dalam riset mengenai peran teknologi digital dalam industri jasa keuangan, termasuk di bank, asuransi, dan pasar modal," ungkap Muchtar Djali.

Untuk tahun ini, ada 7 kategori jasa keuangan yang dipertandingkan, yaitu, kategori bank, yaitu bank konvensional dan bank digital; Sekuritas, kategori sekuritas, yaitu perusahaan asuransi dan asuransi; KLP, kategori reasuransi, yaitu perusahaan reasuransi dan reasuransi; Group, kategori grup asuransi, yaitu perusahaan asuransi jiwa; dan grup asuransi kesehatan, yaitu perusahaan asuransi kesehatan.

Tingkat kematangan digital perbankan di Indonesia pada dimensi kesetiaan menunjukkan rasio sebesar 50 persen pada 2021.

Hal menunjukkan, terdapat 241 perusahaan yang telah diadopsi sebelum pandemi hingga perkembangan produk digital aplikasi mobile bank

SPECIAL REPORT

Daftar Peraih Digital Financial Excellence Award 2023 Media Asuransi

Kategori	Peraih
Bank Digital (Bank)	1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2. PT Bank Central Asia Tbk 3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 4. PT Bank Tabungan Negara Tbk 5. PT Bank Permata Tbk 6. PT Bank Jombang Tbk 7. PT Bank Bina Nusantara Tbk 8. PT Bank Nipah Tbk 9. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk 10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 11. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 12. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tbk 13. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara Tbk 14. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara Tbk 15. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Maluku Tbk 16. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Tbk 17. PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Irian Jaya Barat Tbk 18. PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Irian Jaya Timur Tbk 19. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat Tbk 20. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan Tbk 21. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Sumatera Tengah Tbk 22. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan Lampung Tbk 23. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tbk 24. PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau Tbk 25. PT Bank Pembangunan Daerah Aceh dan Nias Tbk
Bank Digital (Digital Bank)	1. PT Bank Digital Indonesia Tbk 2. PT Bank Jago Tbk 3. PT Bank Neo Commerce Tbk 4. PT Bank Jombang Digital Tbk 5. PT Bank Bina Nusantara Digital Tbk 6. PT Bank Nipah Digital Tbk 7. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Digital Tbk 8. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Digital Tbk 9. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Digital Tbk 10. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Digital Tbk 11. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara Digital Tbk 12. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara Digital Tbk 13. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Maluku Digital Tbk 14. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Digital Tbk 15. PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Irian Jaya Barat Digital Tbk 16. PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Irian Jaya Timur Digital Tbk 17. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat Digital Tbk 18. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan Digital Tbk 19. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Sumatera Tengah Digital Tbk 20. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan Lampung Digital Tbk 21. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Digital Tbk 22. PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau Digital Tbk 23. PT Bank Pembangunan Daerah Aceh dan Nias Digital Tbk
Asuransi	1. PT Asuransi Astra 2. PT Asuransi Garuda Taka 3. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 4. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 5. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 6. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 7. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 8. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 9. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 10. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 11. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 12. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 13. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 14. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 15. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 16. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 17. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 18. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 19. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 20. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 21. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 22. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 23. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 24. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka 25. PT Asuransi Jiwa Garuda Taka
Reasuransi	1. PT Reasuransi Garuda Taka 2. PT Reasuransi Garuda Taka 3. PT Reasuransi Garuda Taka 4. PT Reasuransi Garuda Taka 5. PT Reasuransi Garuda Taka 6. PT Reasuransi Garuda Taka 7. PT Reasuransi Garuda Taka 8. PT Reasuransi Garuda Taka 9. PT Reasuransi Garuda Taka 10. PT Reasuransi Garuda Taka 11. PT Reasuransi Garuda Taka 12. PT Reasuransi Garuda Taka 13. PT Reasuransi Garuda Taka 14. PT Reasuransi Garuda Taka 15. PT Reasuransi Garuda Taka 16. PT Reasuransi Garuda Taka 17. PT Reasuransi Garuda Taka 18. PT Reasuransi Garuda Taka 19. PT Reasuransi Garuda Taka 20. PT Reasuransi Garuda Taka 21. PT Reasuransi Garuda Taka 22. PT Reasuransi Garuda Taka 23. PT Reasuransi Garuda Taka 24. PT Reasuransi Garuda Taka 25. PT Reasuransi Garuda Taka
Group	1. PT Group Garuda Taka 2. PT Group Garuda Taka 3. PT Group Garuda Taka 4. PT Group Garuda Taka 5. PT Group Garuda Taka 6. PT Group Garuda Taka 7. PT Group Garuda Taka 8. PT Group Garuda Taka 9. PT Group Garuda Taka 10. PT Group Garuda Taka 11. PT Group Garuda Taka 12. PT Group Garuda Taka 13. PT Group Garuda Taka 14. PT Group Garuda Taka 15. PT Group Garuda Taka 16. PT Group Garuda Taka 17. PT Group Garuda Taka 18. PT Group Garuda Taka 19. PT Group Garuda Taka 20. PT Group Garuda Taka 21. PT Group Garuda Taka 22. PT Group Garuda Taka 23. PT Group Garuda Taka 24. PT Group Garuda Taka 25. PT Group Garuda Taka
Securities	1. PT Sekuritas Garuda Taka 2. PT Sekuritas Garuda Taka 3. PT Sekuritas Garuda Taka 4. PT Sekuritas Garuda Taka 5. PT Sekuritas Garuda Taka 6. PT Sekuritas Garuda Taka 7. PT Sekuritas Garuda Taka 8. PT Sekuritas Garuda Taka 9. PT Sekuritas Garuda Taka 10. PT Sekuritas Garuda Taka 11. PT Sekuritas Garuda Taka 12. PT Sekuritas Garuda Taka 13. PT Sekuritas Garuda Taka 14. PT Sekuritas Garuda Taka 15. PT Sekuritas Garuda Taka 16. PT Sekuritas Garuda Taka 17. PT Sekuritas Garuda Taka 18. PT Sekuritas Garuda Taka 19. PT Sekuritas Garuda Taka 20. PT Sekuritas Garuda Taka 21. PT Sekuritas Garuda Taka 22. PT Sekuritas Garuda Taka 23. PT Sekuritas Garuda Taka 24. PT Sekuritas Garuda Taka 25. PT Sekuritas Garuda Taka

Engagement to users, Customer Experience, Customer Experience, Customer Satisfaction (CSAT), Usage of AI in Improving Customer Experience, Trust Level, Sentiment, Customer Perception, Customer Insight, Understanding customer usage of AI for customer insight, dan Customer Disabilitas / Inclusivity.

Sandy mengatakan bahwa survei ini dilakukan di seluruh Indonesia dan yang terbesar responden di Jabodetabek mencapai 10 persen, dengan kelompok usia 65 persen di atas 35 tahun, dan 29 persen berusia 18 tahun hingga 34 tahun, serta 3 persen usia 18 tahun hingga 25 tahun. Responden perempuan lebih banyak mencapai 57 persen dan laki-laki sebanyak 43 persen. Terdapat lebih dari 500 responden dengan metode stratified random sampling kepada pengguna keuangan digital.

Sandy menambahkan dalam paparannya bahwa digitalisasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan sektor jasa keuangan. "Saat ini kita sedang menuju ke sana, pengembangan digitalisasi juga memiliki manfaat untuk memberikan pelayanan yang baik dan lebih efisien bagi para nasabah," ujar Sandy. ■

Media Asuransi

Judul	Asset That Follows Me, Asuransi Sebagai Warisan
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Ulasan Buku Asuransi
Halaman/URL	Pg62
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive



ASSET THAT FOLLOWS ME
Sifat Harta dan Risikonya

harta yang pertama dan risiko harta yang mengikutinya. Apa saja yang harus diketahui, ketentuan apa yang harus dipahami dalam memiliki harta, bagaimana mengurangi dampak risiko, dan apa yang langkah ideal yang harus dilakukan dalam jangka pendek hingga jangka panjang secara sederhana, aplikatif, terbuka dan terus bertumbuh sesuai ketentuan dan keilmuannya.

Asset That Follows Me adalah buku yang menceritakan sebuah solusi kontrak pertanggungan pada seseorang agar para praktisi keuangan, khususnya praktisi asuransi yang memilikinya, dapat memiliki pemahaman mudah atau *softskill* cara menjelaskan manfaat asuransi. Pendekatan hukum dan administrasi yang digunakan sangat berbeda dengan solusi yang ada dan sangat mencerminkan solusi kebutuhan asuransi yang sebenarnya.

Henry mengatakan saat memiliki harta prinsipnya diverifikasi, efisiensi, manfaat, dan likuid. Hal tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan saat ini maupun saat risiko terburuk tiba.

"Saat risiko kehidupan terjadi, dampak yang terburuk adalah akses harta, dimana asuransi punya akses hartanya tercepat saat ada risiko," ujar Henry.

Buku ini juga menekankan bahwa ketika terjadi risiko yang dapat menghilangkan nyawa, tentunya bagi keluarga yang ditinggalkan adalah sebuah luka mendalam, tetapi tidak dapat dipungkiri warisan yang bermanfaat perlu ditinggalkan bagi keluarga, salah satunya melalui uang klaim asuransi jiwa.

"Asuransi jiwa melalui uang pertanggungannya akan memberikan kesan bahwa pemilik polis ternyata terus cinta bagi penerima manfaatnya, karena setelah meninggal pun tetap ada sesuatu yang diberikan. Perasaan itu adalah perasaan cinta yang utuh," ungkap Henry. ■

Benyamin D. Hana

Spesifikasi Buku

Judul	: ASSET THAT FOLLOWS ME
Penulis	: Henry Januar
Halaman	: 158 Halaman
Penerbit	: Dendellion
Tahun	: 2023

Pada umumnya kita tahu ada kegiatan memiliki pendapatan dan mengubahnya menjadi harta. Pernahkah kita mengetahui konsekuensi jika kita tidak paham cara mengkreasikan harta yang disesuaikan dengan tujuan dan manfaat harta sesuai dengan rencana kita?

Buku berjudul *Asset That Follows Me* ditulis berdasar ilmu serta pengalaman penulis lebih dari 20 tahun pada beberapa bidang.

Dalam buku karangan Henry Januar ini, dibahas sifat

62

MEDIA ASURANSI □ Januari 2024 □ No. 396 □ Tahun XLIII

Judul	Alexander Grenz: The future of Allianz in Indonesia's Life Insurance Industry
Nama Media	Jakarta Post
Newstrend	Advertorial Allianz Life
Halaman/URL	Pg12
Tanggal Berita	26/01/2024
Sentimen	positive

Alexander Grenz: The future of Allianz in Indonesia's life insurance industry

Founded in 1890 in Munich, Germany, Allianz is one of the world's leading integrated financial service provider. In Indonesia, its presence began in 1981 with a representative office, followed by the establishment of Allianz Utama Indonesia in 1989 for general insurance and Allianz Life Indonesia in 1996 for life and health insurance. In 2023, Allianz further expanded with the launch of Allianz Life Syariah, which is dedicated to sharia-based life and health protection.

In 2023, Alexander Grenz assumed role of Country Manager and President Director of Allianz Life Indonesia, and *The Jakarta Post* had an opportunity to sit down with him in January 2024 to discuss the current situation of Indonesia's life insurance industry and what the insurer planned to further contribute.

Originally from Germany, Grenz has accumulated over 20 years of experience across the globe through his career in Allianz. For the past decade he has been working in Southeast Asia, and today he is overseeing Allianz in Indonesia.

We started by asking about his experience so far in Indonesia.

"I'm still very new to this country, but I realize that there is a very strong sense of community where people always try to lend a helping hand to accomplish things," Grenz answered.

Then we inquired on his leadership style at Allianz, to which Grenz emphasized his strong belief in collaboration and dislike towards thick layers of bureaucratic hierarchy.

"Internally, I think we can call it collaborative leadership, because I believe that Allianz has to empower its people. We need to trust our people in taking bold actions and aspirations independently," Grenz explained.



Alexander Grenz
Country Manager and President Director of Allianz Life Indonesia

When asked what plans he has in store in regards to leading Allianz in Indonesia, where the company has more than 10 million insured, Grenz outlined a four-pillar strategy for Allianz in Indonesia, the first pillar being growth.

"Internally, we call our strategy 'double in five', which means doubling our customer base in five years. This will be equivalent to an average of 15 percent growth per year. Over the last [few] years, our customer base grew by around 4 percent, with last year hovering at 8 percent, so it is a bold ambition."

Grenz's second pillar focused on the company's products and technical excellence, particularly on fine-tuning Allianz products so that they are affordable and offers the right values for customers.

Their third pillar revolves around services and IT, particularly on improving the accessibility and ease of use of Allianz products through technology.

Lastly, their 4th pillar focuses on the people and culture of Allianz itself. Through this Grenz wishes to imbue a mindset of customer-centricity for his team so that they can offer the best service.

Considering Indonesia's majority Muslim population, the

Post inquired about the prospects of Allianz Life Syariah.

"Since we started our sharia business in 2006, we have seen a good trend and also very, very good growth rates in that particular business area," said Grenz.

Syariah products have a low penetration rate of 0.2 percent compared to 2.3 percent of conventional products. Growth rates however, are significantly higher, hovering at around 10 percent, suggesting a rising trend for demand.

Grenz also noted that the entity received a full endorsement from the Indonesian Vice President, Prof. Dr. (H.C) K.H Ma'ruf Amin, who attended the inauguration event of Allianz Syariah.

Asked about his outlook for Indonesia's life insurance industry in 2024, Grenz told the *Post* that this year could shape up to be a very positive one with a myriad of opportunities for growth.

"Last year we just started to come out of the pandemic, and awareness for health insurance increased significantly. It's on us to make sure that we provide adequate solutions to all segments in this industry. So there is room for improvement, and we can offer more holistic solutions for a wider audience, to achieve good growth in 2024 and beyond," he said.

To help improve financial literacy in the country, Allianz has also initiated educational programs that cover a wide range of segments.

"In 2023, we have already done more than 400 seminars for all types of customers. We are focusing on schoolchildren, young adults, families and different types of communities in different areas, rural areas [and] even metropolitan areas," said Grenz.

To conclude the discussion, Grenz reiterated that life insurance must become easier to understand and access for all Indonesians. Through this, he hopes that Allianz can ultimately help the government realize its ambition of raising the financial inclusion rate above the current 16 percent.

"I think Indonesia is a country full of opportunities, I like the vision of the government for 2045 to become one of the top developed markets in the world, and I strongly believe it can [be] from the little time I [have] spent here. We, as Allianz, want to support that."

"Our purpose is to secure your future, and I'm optimistic that we will," Grenz closed.

Judul	Laris, Lelang Tas Mewah Milik Istri Benny Tjokro
Nama Media	Rakyat Merdeka
Newstrend	Hasil Lelang Barang Sitaan Tersangka Jiwasraya
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	26/01/2024
Sentimen	positive

Barang Sitaan Kasus Jiwasraya

Laris, Lelang Tas Mewah Milik Istri Benny Tjokro

PUSAT Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan lelang barang sita eksekusi berupa enam tas merek Hermes milik istri Benny Tjokrosaputro.

Benny Tjokro adalah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, keenam tas itu laku melampaui di atas harga limit.

"Bahwa dari enam obyek lelang dengan total nilai limit Rp 363.000.000 telah laku terjual dengan total nilai laku terjual Rp 606.250.000 dengan kenaikan dari nilai limit sebesar Rp 243.250.000," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1/2024).

Keenam tas itu telah dilelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV. Hasil lelang ini diumumkan pada 24 Januari 2024.

Ketut mengatakan lelang ini

diharapkan dapat berdampak pada pulihnya perekonomian negara serta mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tas mewah milik istri Benny Tjokro yang laku dilelang yakni tas Hermes model Kelly 35 Stamp Square N, bahan Togo Leather warna jingga (*Gold*/code 06) dengan nilai limit Rp 53.000.000. Laku terjual Rp 95.400.000.

Kemudian, tas Hermes model Birkin 35 Stamp Square O, bahan Clemence Leather, warna merah tua (*Rouge Casaque*/code Q5) dengan nilai limit Rp 61.000.000. Laku terjual Rp 97.600.000.

Lalu, tas Hermes model Birkin 35 Stamp Square N, bahan Clemence Leather, warna coklat (*Etain*/code 8F) dengan nilai limit Rp 60.000.000. Laku terjual Rp 102.000.000.

Tas Hermes model Birkin

35 Stamp Square N, bahan Togo Leather, warna biru (*Mykonos*) ditawarkan dengan harga Rp 62.500.000. Laku terjual Rp 96.875.000.

Begitu pula tas Hermes model Birkin 35 Stamp Square O, bahan Togo Leather, warna merah cabai (*Rouge de Cover*/code S3) dengan nilai limit Rp 65.500.000. Laku terjual Rp 101.525.000.

Terakhir, tas Hermes model Birkin 35 Stamp Square N, bahan Clemence Leather, warna hitam (*Noir*/code 89) dengan nilai limit Rp 61.000.000. Laku terjual Rp 112.850.000.

Sebelumnya, Kejagung genjar menyita berbagai aset Benny Tjokro untuk menutupi kerugian negara kasus Jiwasraya. Berdasarkan putusan pengadilan, bos PT Hanson Internasional itu harus membayar uang pengganti sebesar Rp 6 triliun.

Terakhir, Kejagung menyita lahan seluas 128.231 meter persegi atau 12,8 hektare di Desa Pasirgadung, Kecamatan Ci-

kupa, Kabupaten Tangerang.

Ketut mengemukakan aset ini ditemukan tim Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus).

Pencarian aset dipimpin langsung Direktur Uheksi Undang Mugopal pada 3-5 Mei 2023. Setelah menyakini lahan itu milik Benny, tim Kejagung pun menyita. "Setelah disita eksekusi, selanjutnya dititipkan kepada pemerintah setempat melalui Kepala Desa Pasir Gadung," kata Sumedana.

Dia menjelaskan, sita eksekusi dilakukan dalam rangka melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung Nomor: 2937 K/PID.SUS/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro.

Penyitaan juga berdasarkan surat perintah pencarian harta benda milik terpidana dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, serta surat perintah Jaksa Agung

tentang tim inventarisasi dan optimalisasi barang rampasan serta barang sita eksekusi terkait perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.

Sebelumnya, jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus) menyita aset tanah dan bangunan di Surakarta dan Sukoharjo, Jawa Tengah, milik Benny.

Di Solo, Kejari Jakpus menyita tanah dan bangunan Benteng Vastenburg. Dijelaskan di papan pengumuman bahwa bangunan ini disita terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro.

Sementara di wilayah Sukoharjo, Kejari Jakpus menyita tempat wisata waterboom. Lokasinya di Solo Baru, Kecamatan Grogol Sukoharjo. Tempat wahana wisata air terbesar di Kabupaten Sukoharjo ini juga tercatat sebagai milik Benny. ■ GPG

Judul	Target Lelang Turun 21%
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Hasil Lelang Barang Sitaan Tersangka Jiwasraya
Halaman/URL	Pg11
Tanggal Berita	26/01/2024
Sentimen	positive

| PENGELOLAAN ASET NEGARA |

Target Lelang Turun 21%

Bisnis, JAKARTA — Setelah berhasil mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan justru menurunkan target lelang pada tahun ini.

Pada tahun lalu, realisasi nilai pokok lelang tercatat mencapai Rp44,34 triliun, naik sebesar 25,85% dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya senilai Rp35,23 triliun.

Adapun pada tahun ini, target lelang hanya Rp35 turun alias anjlok hingga 21,06% dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu.

Direktur Lelang Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Joko Prihanto mengatakan, terbatasnya target pada tahun ini disebabkan tidak adanya aset besar yang dilelang.

“Untuk 2024 target yang ditetapkan memang tidak se-

besar capaian, karna 2023 kan ada dua *booming* [aset Jiwasraya dan Kebun Kelapa Sawit,” katanya, Kamis (25/1).

Pada tahun lalu, lelang dari aset sitaan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memang menjadi yang termahal, yakni mencapai Rp1,9 triliun.

Nilai lelang terbesar juga tercatat dari lelang hak tanggungan kebun kelapa sawit di Sumatra senilai Rp1,9 triliun. Artinya, dua lelang tersebut saja sudah mencatatkan nilai hampir Rp4 triliun.

“[Lelang ini] mungkin mengindikasikan penegakan hukum di Indonesia mulai bagus,” tutur Joko.

Adapun, secara total nilai pokok transaksi lelang Rp44,34 triliun pada 2023 tercatat menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah lelang. Capaian ini bahkan melebihi target 2023 yang senilai Rp33

triliun.

Dari total nilai pokok lelang Rp44,34 triliun tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara senilai Rp4,59 triliun.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, mengatakan pelayanan lelang yang menjadi salah satu tugas DJKN selain mengelola aset negara, terus meningkatkan peran dan fungsi dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Lelang merupakan salah satu instrumen yang mampu menggerakkan ekonomi Tanah Air dengan meningkatkan potensi nilai dari barang yang dilelang,” katanya.

Sebagai informasi, lelang merupakan upaya untuk mendukung penegakan hukum, tertib administrasi aset negara, dan membantu penyelesaian kredit bermasalah. (Annasa R. Kamalina)

Judul	MANUEVER INVESTASI INVESTOR INSTITUSI
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Strategi Investasi Industri Asuransi Jiwa
Halaman/URL	Pg1
Tanggal Berita	26/01/2024
Sentimen	positive

Pergerakan Imbal Hasil Surat Utang Negara Tenor 10 Tahun (dalam persen)

MANUEVER INVESTASI INVESTOR INSTITUSI

Volume dan Frekuensi Transaksi Surat Berharga Negara

Periode	Volume (Rp triliun/hari)	Frekuensi Harian
2019	17,49	983
2020	25,72	1.841
2021	24,45	2.008
2022	20,6	2.066
2023	21,08	2.819

Sumber: Periklis Harga EMI Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Risiko (DJPR) Kementerian Keuangan, Bandung

Penempatan Dana Investor di Surat Berharga Negara Sepanjang 2023 dan 2024 (Rp triliun)

Investor	Desember 2022	Desember 2023	24 Januari 2024	Perubahan Sepanjang 2023	Perubahan Sepanjang 2024
Bank	1.697,43	1.495,19	1.570,82	-202,24	75,63
Pemerintah	1.020,02	1.095,51	1.043,91	75,49	-51,60
Reksa Dana	145,82	177,80	178,96	31,97	1,16
Asuransi dan Dana Pensiun	873,03	1.041,40	1.052,23	168,37	10,83
Asing	782,19	842,05	849,02	79,87	6,97
Individu	344,30	435,28	439,45	94,97	4,17
Total	5.309,43	5.639,21	5.492,66	329,78	53,45

Sumber: WNI Capital

Rika Anugrawati & Artha Advisory
rskab@fintains.com

Situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian tinggi pada tahun ini membuat investor institusi harus mengat strategi lebih jitu, guna mencari instrumen yang aman, tetapi tetap memberikan imbal hasil yang menarik.

Belakangan, ekspektasi pemburuan ekonomi global mendorong penurunan suku bunga acuan. Selain ekspektasi penurunan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve, bank sentral China rupanya juga mengirim sinyal yang sama. People's Bank of China (PBOC) siap menurunkan suku bunga sebesar 0,5 poin persentase pada awal Februari 2024.

Di Tanah Air, momentum penurunan suku bunga acuan telah dinantikan guna mengakumulasi keuntungan pada aset pendapatan tetap, termasuk Surat Berharga Negara (SBN). Kalangan investor institusi pun diramal bakal gencar mengucurkan dana ke SBN sepanjang 2024, melanjutkan tren pada 2023.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan sepanjang 2023, investor asing dan investor institusi lokal mengakumulasi *inflow*, kecuali industri bank yang menarik dananya sebesar Rp202,24 triliun.

Adapun, mengawali tahun 2024, perbankan memimpin aliran dana masuk ke SBN yang diikuti oleh industri asuransi dan dana pensiun. (Lihat infografik)

Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tumpubolon mengatakan bahwa investasi asuransi jiwa pada tahun ini meritikberalikan pada SBN. Kebijakan investasi ini mempertimbangkan ekspektasi pemangkas suku bunga acuan The Fed pada paruh kedua.

Penurunan suku bunga acuan itu, katanya, akan menggiring dana investor global ke aset berisiko yakni yang ditawarkan negara berkembang, termasuk Indonesia. Dia pun mengakui bahwa bakal lebih berlimpah sejalan dengan harapan masuknya dana asing.

"Kalau itu kejadian, mungkin iklim investasi pasar modal kita akan membaik," katanya di Jakarta, Kamis (25/1).

Menurutnya, selain mempertimbangkan sentimen itu, SBN menjadi instrumen yang sesuai bagi perusahaan asuransi jiwa. Dia

RISIKO RENDAH
Dibubungi terpisah, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi mengatakan dana pensiun masih memiliki minat terhadap SBN terlepas dari kewajiban alokasi aset pada surat utang negara itu. SBN menjadi pilihan karena stabilitas imbal hasil dan risiko rendah gagal bayar.

Dia menilai ada peluang bagi surat utang pemerintah mendapatkan peringkat lebih baik. Kinerja makroekonomi yang *moncer* mendorong prospek tersebut sehingga menambah daya tarik SBN. Saat ini surat utang Pemerintah RI memiliki peringkat BBB (triple B) dari lembaga pemberingkat utang.

"Menurut saya, peringkat [surat utang] akan naik atau paling tidak stabil."

Kendati demikian, menurutnya, pelaku usaha dana pensiun masih memantau perkembangan tingkat suku bunga dan kinerja nilai tukar rupiah di hadapan dolar AS. Demikian pula dengan penyediaan kebutuhan likuiditas dengan seri yang beredar di pasar.

Sementara itu, Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penialih Harga Efek Indonesia (PHEI) Roby Rusdiana mengatakan SBN tenor pendek menjadi pengaman dari risiko seiring dengan masih tingginya ketidakpastian.

Sementara itu, SBN tenor panjang memberikan peluang yield tinggi di tengah prospek perlambatan ekonomi.

Dia menjelaskan secara umum, peringkat surat utang RI masih bertahan sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi stabil, dan tingginya risiko eksternal yang bisa menekan kinerja fiskal negara.

Saat ini, katanya, pasar masih mencermati kebijakan dovish The Fed. Pasar yang *wait and see* juga mempertimbangkan Pemilu Indonesia dan Amerika Serikat serta eskalasi konflik Timur Tengah.

"Prospek pasar obligasi tahun ini berpeluang mengalami kenaikan kinerja jika bank sentral menurunkan suku bunga acuan," kata Roby kepada *Bisnis*.

Adapun, Director & Chief Investment Officer, Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra Nazula memprediksi tahun 2024 menjadi periode konstruktif bagi pasar obligasi Indonesia. Faktor-faktor makroekonomi yang mendukung termasuk inflasi yang terjaga dan potensi pemangkasan suku bunga.

Tingkat imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) acuan tenor 10 tahun sebesar 6,7% dianggap sebagai titik masuk menarik bagi investor.

"Kami memproyeksikan imbal hasil SBN 10 tahun dapat turun ke kisaran 6%-6,25% pada tahun ini."

Sejalan dengan prospek tersebut, permintaan obligasi negara juga masih solid dari kalangan investor asing dan institusi domestik. Namun, dia menekankan pada risiko seperti pasokan SBN pada semester II/2024 dan selisih imbal hasil SUN dengan US Treasury. ■

Judul	Target Transaksi Lelang Tahun 2024 Menurun
Nama Media	Kontan
Newstrend	Hasil Lelang Barang Sitaan Tersangka Jiwasraya
Halaman/URL	Pg2
Tanggal Berita	26/01/2024
Sentimen	positive

Lobi

Target Transaksi Lelang Tahun 2024 Menurun

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) menargetkan nilai transaksi lelang pada 2024 mencapai Rp 35 triliun. Nilai tersebut menurun 21,6% dibandingkan realisasi 2023 yang sebesar Rp 44,34 triliun.

Direktur Lelang Ditjen Kekayaan Negara Kemkeu, Joko Prihanto menyampaikan, meski menurun, target nilai transaksi lelang 2024 masih tumbuh 6,06% dibandingkan target tahun lalu yang sebesar Rp 33 triliun.

"Untuk target lelang di 2024 memang tidak sebesar pencapaian (2023), karena di 2023 ada dua *booming*," kata dia, Kamis (25/1).

Joko menjelaskan, realisasi transaksi lelang 2023 yang melampaui target disebabkan oleh dua kasus. *Pertama*, terkait penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus korupsi yang melilit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sekaligus ikut menyeret perusahaan tambang batubara PT Gunung Bara Utama (GBU) di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dari kasus tersebut, ada penyitaan saham tambang batubara dengan transaksi lelang Rp 1,9 triliun.

Kedua, pada 27 Desember 2023 terdapat lelang hak tanggungan kebun kelapa sawit sebesar Rp 1,9 triliun. "Dari dua lelang ini cukup besar, kontribusinya kurang lebih Rp 4 triliun. Lelang yang nilainya Rp 200 miliar rata-rata banyak sektor properti dan pabrik juga ada," tambah Joko.

Siti Masitoh

Judul	Suksesi Prudential Syariah
Nama Media	Kontan
Newstrend	Presdir Baru Prudential Syariah
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	26/01/2024
Sentimen	positive

Suksesi Prudential Syariah

JAKARTA. PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) resmi menunjuk Iskandar Ezzahuddin Ahmad Zulkiflee sebagai Presiden Direktur. Sebelum didapuk sebagai nakhoda baru Prudential Syariah, Iskandar memiliki banyak pengalaman kepemimpinan.

Tahun 2021, Iskandar bergabung dengan Prudential sebagai *Chief Marketing Officer* Prudential BSN Takaful Berhad (PBTB). Kontribusi Iskandar semakin luas setelah ditunjuk sebagai CEO DEEN by Prudential, yang membangun ekosistem teknologi syariah. Hingga kuartal III-2023, Prudential Syariah telah melakukan pembayaran klaim sebesar Rp 1,6 triliun, dengan 79.000 partisipan.

Iskandar menambahkan, dengan populasi muslim terbesar di dunia, industri syariah di Indonesia memiliki potensi sangat besar. "Jadi, saya optimistis melanjutkan upaya pertumbuhan penetrasi asuransi syariah dan memperkuat posisi Indonesia di pasar syariah global," ungkap Iskandar dalam keterangan resminya, Kamis (25/1).

Shifa Nur Fadila

Judul	Voting Wanaartha Batal
Nama Media	Kontan
Newstrend	Wacana Likuidasi Wanaartha
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	26/01/2024
Sentimen	positive

Voting Wanaartha Batal

JAKARTA. Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha mengumumkan pembatalan ketentuan *voting* dalam rencana tatacara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi Wanaartha Life (WAL). "Ketentuan mengenai *voting* tanggal 12 Januari 2024 tersebut tidak akan diberlakukan," sebut Tim Likuidasi dalam keterangan resmi, Kamis (25/1).

Tim likuidasi juga mengumumkan fitur *voting* yang ada dalam aplikasi Likuidasi Wanaartha akan dinonaktifkan sementara waktu. Keputusan ini berdasarkan hasil audiensi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan beberapa pemegang polis pada 23 Januari. Ini dilanjutkan dengan pertemuan beberapa pemegang polis dan tim likuidasi pada 24 Januari, serta hasil diskusi tim dengan OJK.

Atas dasar itu, tim likuidasi menyebut, rencana tatacara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi PT WAL tanggal 12 Januari 2024 akan direvisi atau disesuaikan, lalu akan diumumkan lebih lanjut.

Ferry Saputra

Judul	Prudential Buka Peluang Kerja Sama dengan Rumah Sakit Kelolaan Kemenkes
Nama Media	jpnn.com
Newstrend	Kerja Sama Prudential dengan Kemenkes dan Sejumla RS
Halaman/URL	https://www.jpnn.com/news/prudential-buka-peluang-kerja-sama-dengan-rumah-sakit-kelolaan-kemenkes
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive

Prudential Buka Peluang Kerja Sama dengan Rumah Sakit Kelolaan Kemenkes

Kemla, 25 Januari 2024 - 17:42 WIB



Prudential Indonesia buka peluang kerja sama dengan rumah sakit kelolaan Kemenkes melalui transformasi layanan rujukan. Foto: Supplied

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance terus memperkuat komitmen perlindungan untuk nasabah dengan menghadirkan Inovasi layanan terdepan.

Inovasi guna meningkatkan efektivitas dan profesionalitas pelayanan kesehatan yang memberikan nilai lebih, salah satunya dengan membuka peluang kerja sama dengan rumah sakit kelolaan Kementerian Kesehatan melalui Transformasi Layanan Rujukan.

Komitmen ini dipertegas dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Kemenkes di Makassar, Sabtu (20/1).

Judul	Merayakan Ulang Tahun ke-9, Bank Mandiri Taspen Menggelar Operasi Katarak Bersama Allianz
Nama Media	jakarta.suaramerdeka.com
Newstrend	TJSL Allianz
Halaman/URL	https://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/13411662426/merayakan-ulang-tahun-ke-9-bank-mandiri-taspen-menggelar-operasi-katarak-bersama-allianz?page=all
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive

Merayakan Ulang Tahun ke-9, Bank Mandiri Taspen Menggelar Operasi Katarak Bersama Allianz

Mahendra Bungalan - Kamis, 25 Januari 2024 | 20:08 WIB



Jakarta, suaramerdeka-jakarta.com - [Bank Mandiri Taspen](#) mempersembahkan inisiatif kemanusiaan dalam rangka merayakan ulang tahun ke-9. Dengan semangat penuh dedikasi, bank ini mengadakan [operasi katarak](#) untuk nasabah dan keluarga nasabah di Jakarta.

Tahapan operasi katarak yang dimulai pada Rabu (24/1) di Graha Mantap, Jakarta Pusat ini tidak hanya sekadar acara perayaan ulang tahun, namun juga wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan yang memahami bahwa kesehatan mata adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan para pensiunan. Melalui kegiatan ini, Bank Mandiri Taspen berupaya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, khususnya nasabah dan keluarganya.

Judul	Iklan - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Iklan AAJI
Halaman/URL	Pg9
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive



Judul	Iklan - Digital Financial Excellence Awards 2023
Nama Media	Media Asuransi
Newstrend	Sejumlah Perusahaan Asuransi Jiwa Raih Digital Financial Excellence Award 2023
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	25/01/2024
Sentimen	positive



Judul	Berita Foto - Premi Asuransi Jiwa
Nama Media	Kontan
Newstrend	Catatan Kinerja Industri Asuransi Jiwa
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	26/01/2024
Sentimen	positive

Premi Asuransi Jiwa



KONTAN/Baihaki

Pelayanan nasabah di sebuah perusahaan asuransi jiwa di Jakarta, Kamis (25/1). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa membaik namun masih terkontraksi sebesar 7,18% secara tahunan, dengan nilai Rp 160,88 triliun per November 2023.

Judul	Berita Foto - Proyeksi Premi Asuransi Jiwa
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Catatan Kinerja Industri Asuransi Jiwa
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	26/01/2024
Sentimen	positive

PROYEKSI PREMI ASURANSI JIWA



Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Pekerja beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Kamis (25/1).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan premi asuransi jiwa pada tahun ini tumbuh sebesar 4,4% dengan akumulasi premi sebesar Rp165,92 triliun.